

ANALISIS PENGARUH FAKTOR KOMITMEN PIMPINAN, SUMBERDAYA MANUSIA DAN PERANGKA PENDUKUNG TERHADAP KETEPATAN WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN KEUANGAN

Jaurino1)

Drs. H. Jaurino, M.Si, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Panca Bhakti Pontianak

Abstract

This research was conducted at SKPD contained in Landak District Government regarding Factors Affecting the timely submission of accountability reports. To that end, the authors conducted a study titled "Analysis of Factors Influence Leadership Commitment, Human Resources and Support Tools to Timeliness Report on Financial Accountability. The method used in this research is the method of Quantitative Research. Quantitative research methods is one of the designated research is a systematic, planned and structured clearly from the outset to the creation of the research design. The analysis tool used is the analysis of test statistics. Techniques and Data Collection Through Deployment Kuesioner. Hasil analysis conducted shows that Good Simultaneous Partial Commitment and Leadership, Human Resources and Tools Supporting simultaneous positive effect on timeliness of government reporting at Landak District

Keywords: Accountability report, Commitment Leadership, Human Resources, Support Tool, Landak District Government.

PENDAHULUAN

Sejak dilaksanakannya desentralisasi yang diwujudkan dengan pemberian fungsi dan tanggung jawab kepada daerah propinsi, kabupaten dan kota, maka sesuai dengan prinsip “money follow function” dimana pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pemerintahan, dengan adanya pengalihan dan penyerahan sebagian tugas serta wewenang yang semula menjadi urusan pemerintah pusat kepada daerah, maka timbul pula konsekuensi logis bagi pemerintah pusat untuk mengalokasikan sebagian sumber pendanaan atau pembiayaan ke daerah. Adapun dasar-dasar pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tersebut didasarkan pada asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas perbantuan yang secara formal di atur dengan ditetapkannya UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.

Oleh karena itu, sesuai dengan prinsip “money follow function” dan ketentuan tentang dana perimbangan di atas, dengan semakin banyaknya dana yang harus dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah tentunya dukungan sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik di daerah amat dibutuhkan. Untuk itu guna mengatur hal tersebut, sekaligus sebagai wujud komitmen pemerintah dalam menjawab tuntutan masyarakat yang menghendaki agar pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara lebih baik, maka kemudian pemerintah mengeluarkan paket kebijakan atau peraturan dalam upaya mewujudkan agar pengelolaan Oleh karena itu, sejalan dengan prinsip-prinsip pelaporan, yang salah satunya mengedepankan pentingnya ketepatan waktu (timeliness), maka agar dapat dihasilkan laporan keuangan secara tepat waktu, input yang berasal dari berbagai dokumen sumber, salah satunya adalah SPJ pengeluaran dari tiap-tiap SKPD juga harus disampaikan secara tepat waktu. Namun, di samping ketepatan waktu, agar dihasilkan laporan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, dokumen yang akan dijadikan masukan dalam proses penyusunan laporan keuangan diharapkan juga telah dilengkapi dengan bukti yang lengkap dan sah. Hal ini sesuai dengan prinsip penggunaan dana, yang menyebutkan bahwa setiap pengeluaran atau belanja harus dilengkapi dengan bukti yang lengkap dan sah.

Sehubungan dengan kegiatan pertanggungjawaban penggunaan dana di SKPD, dalam Pasal 220 ayat (10) Permendagri 13/2006 diatur hal sebagai berikut: “Bendahara pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.”

Di samping mengatur tentang penyelenggaraan pelaporan keuangan ditingkat SKPD, Permendagri 13/2006 tersebut secara tegas juga mengatur bahwa semestinya kepala daerah telah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung-jawaban pelaksanaan kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Namun, pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ladak meski telah di atur mengenai ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan daerah, hal tersebut disebabkan oleh:

1. Bagian pelaksana penyusunan laporan pertanggungjawaban kurang memahami tentang ketentuan pelaksanaan penyusunan laporan pertanggungjawaban sehingga mengalami keterlambatan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban.
2. Keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban oleh SKPD. Keterlambatan ini disebabkan oleh tidak berfungsinya perangkat pendukung yang terdapat pada SKPD. Hal ini disebabkan oleh sering eromya jaringan internet pada unit SKPD yang jauh dari daerah kota sehingga input data laporan pertanggungjawaban harus dilaksanakan pada SKPD pusat di BPKAD.

3. Sehingga akibat dari keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban tersebut, berdampak pada ketepatan waktu dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya. Untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan komitmen para pegawai.
- Atas penjelasan di atas, meski terlihat sederhana, ternyata permasalahan dalam hal pertanggungjawaban penggunaan dana yang berasal dari SKPD atau yang lebih dikenal dengan istilah surat pertanggungjawaban (SPJ) tidak dapat dipandang sebelah mata. Hal ini mengingat karena dalam kegiatan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, ketidak tepatan surat pertanggungjawaban (SPJ) dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menjadi hal yang crucial, karena SPJ merupakan salah satu wujud bukti transaksi pengeluaran yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan sistem akuntansi keuangan daerah, yang antara lain diimplementasikan dalam penyusunan laporan keuangan tahunan pemerintah daerah, yang terdiri dari laporan realisasi anggaran (LRA), neraca, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (CaLK). Keuangan negara dan daerah dapat dilakukan secara efektif dan efisien dengan menggunakan tiga pilar utama melalui tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu: transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

KAJIAN PUSTAKA

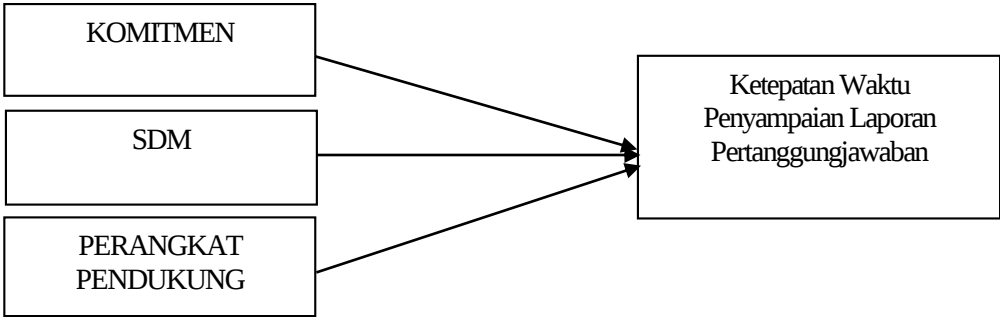
Dalam PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,disebutkan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam 13rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- a. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan daerah;
- d. Pengeluaran daerah;
- e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Selanjutnya dalam PP Nomor 58 tahun 2005 juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,pelaksanaan, penatausahaan pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.Terwujudnya pelaksanaan desentralisasi fiskal secara efektif dan efisisen, salah satunya tergantung pada pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah tak lagi bertumpu atau mengandalkan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten/Kota saja. Tapi, dalam Permendagri itu juga disebutkan, setiap Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) kini wajib menyusun dan melaporkan posisi keuangannya, yang kemudian dikoordinasikan dengan Bagian KeuanganUntuk mewujudkan hal tersebut diperlukan suatu laporan keuangan yang handal dan dipercaya agar dapat menggambarkan sumber daya keuangan daerah berikut dengan analisis prestasi pengelolaan sumber daya keuangan daerah itu sendiri. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah serangkaian prosedur yang dimulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual maupun dengan menggunakan aplikasi komputer. Oleh karena itulah sistem akuntansi menjadi suatu tuntutan sekaligus kebutuhan bagi tiap Pemerintah Daerah.

KERANGKA BERFIKIR DAN DESAIN HIPOTESA

Ketepatan waktu pertanggungjaaban dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya faktor komitmen pimpinan, sumber daya manusia dan perangkat pendukung.



Komitmen dari pimpinan merupakan dukungan yang menjadi kunci yang sangat berpengaruh pada keberhasilan dari suatu perubahan. Salah satu penyebab ketidak tepatan penyampaian laporan prtanggungjawaban adalah sering tidak adanya pejabat untuk menandatangani pertanggungjawaban. Hal ini

menjadi masalah yang sangat serius dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah Kabupaten Landak

Sumber Daya Manusia

Setiap sumber daya manusia harus mempunyai kompetensi yang baik. Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge), dan kemampuan (ability) untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Hevesi,2005). Menurut beberapa pakar, kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya.**Perangkat Pendukung (Teknologi Informasi)**

Teknologi informasi dapat diartikan sebagai suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk pengambilan keputusan.

Perumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Ho : Komitmen Pimpinan, Sumber Daya Manusia dan Perangkat Pendukung tidak berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban

Ha : Komitmen Pimpinan, Sumber Daya Manusia dan Perangkat Pendukung berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban

Pengujian Hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi bergandabertujuan untuk memprediksi berapa besar kekuatan pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent

METODOLOGI PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kasus pada Pemerintahan Kabupaten Landak. Responden dalam penelitian ini adalah seluruh SKPD yang terdapat pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Landak. Secara umum terdapat 50 SKPD yang terdapat pada Pemerintah Daerah Kabupaten Landak.

Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai bagian Keuangan yang terdapat pada 50 SKPD Pemerintah Kabupaten Landak yang sering terlambat dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Jumlah kuesioner yang dibagikan sebanyak 50 kuesioner dengan rincian setiap bidang Keuangan pada SKPD menerima 1 kuesioner.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data yang diperoleh dan pengisian kuesioner untuk memperoleh informasi dari responden. Skala likert (likert scale) merupakan metode pengukuran sikap dengan pernyataan setuju atau tidak setujuannya terhadap subjek, objek atau kejadian tertentu (Indriantoro dan Supomo, 2002:104).

Tabel 1. Skala Likert	
Skala likert	Bobot
Sangat Setuju Sekali	5
Sangat Setuju	4
Setuju	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju Sekali	1

Sumber: Indriantoro dan Supomo, 2002

Analisis uji statistic terhadap Komitmen Pimpinan, Sumber Daya Manusia dan Perangkat Pendukung terhadap Ketepatan waktu pertanggungjawaban menggunakan SPSS versi 17.

Pengujian Hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi bergandabertujuan untuk memprediksi berapa besar kekuatan pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent. Persamaanya adalah sebagai berikut, Dengan Rumus (Djarwanto,1965):

a + b1 X1 +b2 X2 + b3X3 + e = Y

- Y = Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban
- X1 = Komitmen Pimpinan
- X2 = Sumber Daya Manusia (SDM)
- X3 = Perangkat Pendukung
- b1 = Koefisien Regresi Komitmen Pimpina

HASIL PENELITIAN

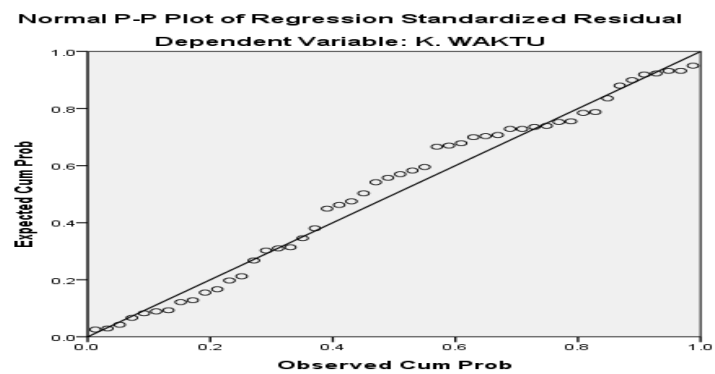
Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas Residual

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel penganggu (residual) dalam sebuah model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau

mendekati normal. Dalam penelitian ini untuk menguji normalitas data penulis menggunakan uji normalitas dengan ouput grafik.

Gambar 1. Grafik Uji Normalitas Data



Sumber: Data Primer Diolah, 2016

Dari grafik diatas, terlihat titik menyebar disekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Maka model regresi layak dipakai untuk memprediksi Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban berdasar masukan variabel independennya.

2. Uji Multikolineritas

Uji multikolineritas bertujuan untuk menguji apakah dalam satu variabel independent ditemukan adanya korelasi antar variabel independent penelitian. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Ada tidaknya korelasi antar variabel terebut dapat dideteksi dengan melihat nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Apabila nila tolerance mendekati satu atau > 0,1 dan mempunyai VIF disekitar angka 1, maka dapat dinyatakan tidak terdapat gejala multikolinier.

Tabel 2. Hasil Uji Multikolineritas

		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	KOMITMEN	.719	1.391
	SDM	.559	1.788
	PP	.661	1.513

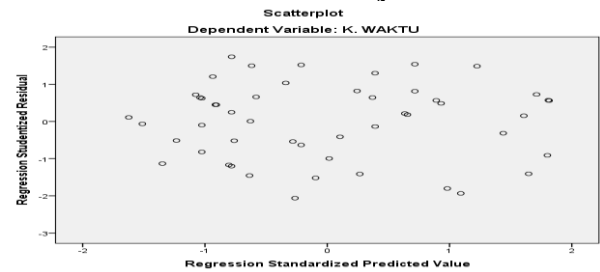
Sumber : Data Primer Diolah, 2016

Berdasarkan tabel 2 diatas dapat diketahui bahwa angka tolerance dari variabel independent Komimen, Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sarana da Prasarana (SAPRAS) mempunyai nilai tolerance mendekati 1 atau > 0,1 yang berarti bahwa tidak ada korelasi antar variabel yang nilainya lebih dari 95%. Sementara itu, hasil dari perhitungan Variance Inflation Factor (VIF) juga menunjukan hal yang sam yaitu semua variabel bebas memiliki VIF disekitaran angka 1. Dengan demikian dapat disimpulkan dalam model regresi tidak terjadi multikolineritas anta variabel indeoendent tersebut.

3. Uji Heterokedastisitas

Pengujian heterokedastisitas dilakukan untuk menguji apakah sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi Heterokedastisitas. Deteksi terhadap masalah heterokedastisitas dilakukan dengan menggunakan metode grafik plot regression standardized predicted value dengan regression studentized residual. Hasil pengujian dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini:

Gambar 2. Grafik Uji Heterokedastisitas



Sumber: Data Primer Diolah, 2016

Dari grafik diatas, terlihat titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. hal ini berarti tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk prediksi kesiapan berdasar masukan variabel independent-nya.

Analisis Regresi Berganda

1. Analisis Uji Anova (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh simultan variabel-variabel independent terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian yang digunakan adalah jika probability value (p value) < 0,05 maka Ha diterima dan jika p value > 0,05 maka Ha ditolak.

Rumusan Hipotesa :

Ho: Komitmen Pimpinan, Sumber Daya Manusia dan Perangkat Pendukung tidak berpengaruh positif terhadap Ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban.

Ha: Komitmen Pimpinan, Sumber Daya Manusia dan Perangkat Pendukung berpengaruh positif terhadap Ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban.

Tabel 3. Hasil Anova (Uji F) ANOVA

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	226.339	3	75.446	37.365	.000b
	Residual	92.881	46	2.019		
	Total	319.220	49			

a. Dependent Variable: K. WAKTU

a. Predictors: (Constant), PP, KOMITMEN, SDM

Sumber: Data Primer Diolah, 2016

Dari hasil pengujian terhadap uji simultan ANOVA Ftest pada tabel diatas diperoleh nilai Fhitung sebesar 37,365 dengan probabilitas 0,000. Karena probabilitas lebih kecil dari nilai signifikan 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi Ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban atau dapat dikatakan bahwa komitmen pimpinan, sumber daya manusia dan perangkat pendukung secara simultan berpengaruh terhadap Ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban.

Secara lebih rinci, nilai Fhitung dibandingkan dengan Ftabel dimana jika F hitung > Ftabel maka secara simultan variabel-variabel independent berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Pada taraf alpha = 0,05 dengan derajat kebebasan pembilang/df1 = k-1 dan derajat kebebasan penyebut/df2 = n-k (k adalah jumlah variabel terikat ditambah variabel bebas), diperoleh nilai Ftabel 2,80. Dengan demikian, nilai Fhitung 37, 365 lebih besar dari nilai Ftabel 2,80. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa variabel komitmen pimpinan, sumber daya manusia dan perangkat pendukung secara simultan berpengaruh terhadap Ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban, atau dengan kata lain Ha diterima sedangkan hipotesis Ho ditolak.

2. Analisis Uji T

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel idependen terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian yang digunakan adalah jika p value < 0,05, maka Ha diterima dan jika p value > 0,05, maka Ha ditolak.

Tabel 4. Hasil Uji Parsial (Uji t)
Coefficientsa

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.433	1.434		.302	.764
	KOMITMEN	.269	.080	.314	3.353	.002
	SDM	.223	.111	.214	2.012	.050
	PP	.523	.102	.502	5.131	.000

a. Dependent Variable: K. WAKTU

Sumber: Data Primer Diolah, 2016

Dari tabel diatas, dapat dilihat persamaan regresi dari hasil pengelolaan data:

$$\text{Ketepatan Waktu} = 0,433 + 0,269 X_1 + 0,223 X_2 + 0,523 X_3 + e$$

Dari hasil persamaan diatas dapat diketahi bahwa ke tiga variable independent berpengaruh terhadap variable dependent. Komitmen pimpinan berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan sebesar 0,269 atau 26,9 persen. Sumber daya manusia berpengaruh sebesar 0,223 atau 22, 3 persen dan Perangkat pendukung mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban sebesar 0,523 atau 52,3 persen. Sedangkan 0,433 atau 43,3 persen dipengaruhi oleh factor-faktor lainnya.

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi konstanta dan menguji setiap variabel independen. Pengambilan keputusan (berdasarkan probabilitas, pada kolom signifikansi)) adalah sebagai berikut:

Jika sig. < 0,05 maka Ha diterima

Jika sig. > 0,05 maka Ho ditolak.

Dan probabilitas value (p value):

Jika p value < 0,05 maka Ha diterima

Jika p value > 0,05 maka Ho ditolak

Hipotesis yang dibangun adalah sebagai berikut:

a. Komitmen Pimpinan (X1)

Hipotesis variabel bebas komitmen pimpinan (X1) adalah sebagai berikut:

Ho1: Komitmen Pimpinan tidak berpengaruh positif terhadap Ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban.

Ha1: Komitmen Pimpinan berpengaruh positif terhadap Ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban.

Pada tabel 5.13 menunjukkan hasil pengujian hipotesis pertama (H1) yang menyebutkan bahwa komitmen pimpinan berpengaruh positif terhadap Ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban.. Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel komitmen pimpinan mempunyai angka signifikan dibawah 0,05. Pada tabel 5.13 menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel komitmen pimpinan (X1) adalah 0,269 dan nilai Thitung 3,353. Variabel komitmen pimpinan mempunyai p value atau signifikansi sebesar 0,002 yang berarti bahwa variabel komitmen pimpinan berpengaruh positif terhadap Ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban.

Hasil ini dipertegas dengan hasil perhitungan nilai Thitung dan Ttabel. Nilai Ttabel pada taraf signifikansi 5% dan df n-k = 46. Dengan demikian, nilai Thitung 3,296 > Ttabel 1,679. Hasil pengujian ini mengintrepetasikan bahwa variabel komitmen pimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban pada taraf signifikansi 5% atau dengan kata lain hipotesis Ha diterima dan Ho ditolak.

Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa Komitmen dari pimpinan merupakan dukungan yang menjadi kunci yang sangat berpengaruh pada keberhasilan dari suatu perubahan. Salah satu penyebab dari keterlambatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban pada setiap SKPD pada setiap pemerintah daerah adalah lemahnya dukungan dari pimpinan. Untuk meningkatkan kinerja para pegawai pimpinan daerah harus berperan aktif dalam mendukung penyelesaian penyusunan laporan pertanggungjawaban.

Pada pemerintah daerah Kabupaten Landak pimpinan daerah sangat mendukung atau sangat berkomitmen dalam ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban, ini dibuktikan dengan adanya peraturan daerah yang mengatur tentang sistem dan prosedur dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban. Peraturan daerah tersebut dituangkan dalam peraturan Bupati Kabupaten Landak.

b. Sumber Daya Manusia (X2)

Hipotesis variabel bebas sumber daya manusia (X2) adalah sebagai berikut:

Ho2: Sumber Daya Manusia (SDM) tidak berpengaruh positif terhadap Ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban.

Ha2: Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh positif terhadap Ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban.

Hasil pengujian hipotesis kedua (H2) yang menyebutkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kesiapan pemerintah daerah di Kalimantan barat dalam menerapkan SAP berbasis akrual, pada tabel 3.13 ditunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel sumber daya manusia (X2) adalah 0,223 dan nilai Thitung 2,012. Variabel sumber daya manusia mempunyai p value atau signifikansi sebesar 0,050 yang berarti bahwa variabel sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap Ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban.

Hasil ini dipertegas dengan hasil perhitungan nilai Thitung dan Ttabel. Nilai Ttabel pada taraf signifikansi 5% dan df n-k = 46. Dengan demikian, nilai Thitung 2,012 > Ttabel 1,679. Hasil pengujian ini mengintrepetasikan bahwa variabel sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban.pada taraf signifikansi 5% atau dengan kata lain hipotesis Ha diterima dan Ho ditolak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia sangat berpengaruh dalam keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual. keberhasilan Penerapan SAP berbasis akrual harus didukung dengan sumber daya manusia yang kompeten . Ini menunjukkan bahwa Ha diterima, yang berarti bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap Ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi kualitas sumber daya manusia dalam pemahaman standar penyusunan laporan pertanggungjawaban, maka semakin tinggi tingkat Ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah Kabupaten Landak.

Kualitas sumber daya manusia yang baik harus memiliki kompetensi yang baik, hal ini sesuai dengan pendapat Hevesi, 2005 bahwa Setiap sumber daya manusia harus mempunyai kompetensi yang baik. Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge), dan kemampuan (ability) untuk melaksanakan suatu pekerjaan.

Pada pemerintahan Kabupaten Landak saat ini masih terkendala dalam bidang ketersediaan Sumber Daya Manusia, hal ini dikarenakan banyak pegawai dibagian akuntansi yang berasal bukan dari sarjana akuntansi hal ini menjadi salah satu masalah yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Landak. Pegawai

yang tersedia saat ini terutama pada bagian penatausahaan tidak memahami ketentuan pelaksanaan penatausahaan yang berdampak pada keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban. Keterlambatan pada penyampaian laporan pertanggungjawaban akan berdampak pada ketepatan waktu penyusunan anggaran tahun berikutnya.

c. Perangkat Pendukung

Hipotesis variabel bebas perangkat pendukung (X3) adalah sebagai berikut:

Ho3: Perangkat Pendukung tidak berpengaruh positif terhadap Ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban.

Ha3: Perangkat Pendukung berpengaruh positif terhadap Ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban.

Hasil pengujian hipotesis berikutnya atau ketiga yang menyebutkan bahwa perangkat pendukung (jaringan teknologi) berpengaruh positif terhadap kesiapan pemerintah daerah di Kalimantan barat dalam menerapkan SAP berbasis akrual, pada tabel 5.13 ditunjukkan bahwa nilai koefisien regresi perangkat pendukung (jaringan teknologi) (X3) adalah 0,523 dan nilai Thitung 5.131. Variabel perangkat pendukung (jaringan teknologi) mempunyai p value atau signifikansi sebesar 0,000 yang berarti bahwa variabel sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap Ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban.

Hasil ini dipertegas dengan hasil perhitungan nilai Thitung dan Ttabel. Nilai Ttabel pada taraf signifikansi 5% dan df n-k = 46. Dengan demikian, nilai Thitung 5,131 > Ttabel 1,679. Hasil pengujian ini mengintrepetaskan bahwa variabel perangkat pendukung (jaringan teknologi) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban pada taraf signifikansi 5% atau dengan kata lain hipotesis Ha diterima dan Ho ditolak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mendukung tercapainya Ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban harus didukung dengan adanya perangkat pendukung (jaringan teknologi) yang memadai. Teknologi informasi dapat diartikan sebagai suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Teknologi informasi meliputi komputer (mainframe, mini, micro), perangkat lunak (software), database, jaringan (internet, intranet), electronic commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson et al., 2000). Pada pemerintahan di Kalimantan barat perangkat pendukung telah disediakan dan dilengkapi guna mendukung keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual.

Saat ini kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah kabupaten landak adalah belum meratanya ketersediaan perangkat pendukung dan jaringan teknologi berupa jaringan internet yang tersedia. Tidak berfungsinya jaringan internet ini menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh setiap SKPD di lingkungan pemerintah daerah kabupaten Landak dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan. Sehingga dalam melakukan input data pegawai SKPD yang terdapat pada daerah harus pergi ke SKPD pusat yakni BPKAD.

Untuk mengatasi permasalahan ini pemerintah daerah kabupaten landak harus mencari solusi dengan menyediakan wadah bagi SKPD yang terdapat pada daerah agar tidak terjadi keterlambatan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban. Wadah tersebut dapat berupa adanya jemput bola laporan pertanggungjawaban pada setiap SKPD yang lambat dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Selain itu pemerintah harus meningkatkan kualitas jaringan internet yang tersedia.

REFERENSI

- Abdul Halim, 2002, Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah, Jakarta, Salemba Empat
- Bina Administrasi Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri. 2007. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor SE-900/316/BAKD tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Cetakan Pertama 2007. Penerbit : CV. Eko Jaya, Jakarta.
- Halim, Abdul. 2002. Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Pertama. Penerbit : Salemba Empat, Jakarta.
- Indra Bastian (2006). Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar. Jakarta : Penerbit Erlangga
- Mulyadi. Metodologi Penelitian. Jakarta. Salemba Empat
- Mardiasmo. 2006. "Perwuj dan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance", Jurnal
- Dedi Nordiawan, Iswahyudi Sondi Putra, Maulidah Rahmawati, 2007, Akuntansi Pemerintahan, Jakarta, Salemba Empat.
- Departemen keuangan RI, Mei 2002, Draft Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah: Petunjuk Teknis Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah, Jakarta.
- Hafiz, Abdul T, 2007, Akuntansi Pemerintahan Daerah, Bandung, Alfabeta.
- Harahap, Sofyan S, 2003, Teori Akuntansi, Edisi Revisi, Jakarta, PT Raja
- Suliyanto. Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi Dengan SPSS.
- Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Jakarta, 2003.

Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Jakarta, 2004.